

UPAYA PEMBANGUNAN CITRA ORMAS ISLAM MODERAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA (NU)

Jauhari Fatkhul Muzakki¹ dan Agus Machfud Fauzi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa
jauhari.17040564082@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This research is motivated by the attitudes and views of the cadres of the Nahdlatul Ulama (NU) organization in Trawas District, Mojokerto Regency, who oppose and criticize the activities of other Islamic mass organizations, which are considered to have attacked the Nahdlatul Ulama (NU) organization and the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This is in stark contrast to the concept of moderate Islam which has always been promoted by the Nahdlatul Ulama (NU) organization. So the jargon and claims of being a "moderate Islamic mass organization" by the Nahdlatul Ulama (NU) organization so far tend to lead to mere imagery. Therefore, through the perspective of social motive theory put forward by Alfred Schutz, this study explores the motives of the cadres of the Nahdlatul Ulama (NU) organization in campaigning for the jargon or motto of "moderate Islamic organizations". So the purpose of this research is to find out how the motives and motives of the efforts to build the image of "moderate Islamic organizations" are carried out by the cadres of the Nahdlatul Ulama (NU) organization in Trawas District, Mojokerto Regency. The approach used in this research is using a qualitative approach. While the results of this study indicate that the application of religious moderation, especially to people of other religions, has been going very well, while fellow Islamic organizations often face certain problems caused by several differences in the selection of arguments in the guidelines or basic religious foundations, the selection of methods and methods of da'wah, and different organizational labels. The motives for the efforts to build the image of moderate Islamic organizations carried out by the cadres of the Nahdlatul Ulama (NU) organization include; a) The form or form of respect, obedience, and total trust as a santri to the Kiai Nahdlatul Ulama, b) There is a decline in the quality of the cadres of the Nahdlatul Ulama organization, c) The potential or negative impact of the radicalism movement in Indonesia. Meanwhile, the motives for the efforts to build the image of moderate Islamic organizations carried out by the cadres of the Nahdlatul Ulama (NU) organization include; a) The defense fortress of the Nahdlatul Ulama organization and the Indonesian State, b) Encouraging the structural and cultural cadres of the Nahdlatul Ulama organization, c) Devotion as a santri to the Kiai Nahdlatul Ulama.

Keywords: *Social Motives; Imaging Efforts; Moderate Islam; Islamic Social Organization (Ormas Islam); Nahdlatul Ulama Organization (NU).*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap dan pandangan para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang menentang dan mengancam aktifitas oknum ormas islam lain yang dianggap menyerang organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut sangat bertolakbelakang dengan konsep islam moderat yang selama ini selalu diusung oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Maka adanya jargon dan klaim sebagai "ormas islam moderat" oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) selama ini cenderung mengarah pada upaya pembangunan citra belaka. Oleh karena itu, melalui perspektif teori motif sosial yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, maka penelitian ini menggali motif para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengkampanyekan jargon atau semboyan "ormas islam moderat". Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana motif sebab dan motif tujuan upaya pembangunan citra "ormas islam moderat" yang dilakukan oleh para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama khususnya terhadap umat agama lain selama ini berjalan sangat baik, sedangkan dengan sesama ormas islam seringkali menghadapi kendala masalah tertentu yang disebabkan oleh beberapa perbedaan pemilihan dalil dalam pedoman atau landasan dasar beragama, pemilihan cara dan metode dakwah, serta perbedaan label organisasi. Motif sebab adanya upaya pembangunan citra ormas islam moderat yang dilakukan oleh para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU) diantaranya ; a) Bentuk atau wujud penghormatan, ketaatan, dan kepercayaan total sebagai seorang santri kepada para kiai NU, b) Adanya penurunan kualitas para kader organisasi NU, c) Adanya potensi atau dampak negatif dari gerakan radikalisme di Indonesia. Sedangkan motif tujuan adanya upaya pembangunan citra ormas islam moderat yang dilakukan oleh para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU) diantaranya ; a) Benteng pertahanan organisasi NU dan NKRI, b) Penguat semangat para kader struktural dan kultural organisasi NU, c) Pengabdian santri kepada para kiai NU.

Kata kunci: Motif Sosial; Upaya Pembangunan Citra; Islam Moderat; Ormas Islam; Nahdlatul Ulama (NU).

1. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) di negara Indonesia yang memiliki latar belakang agama Islam dan menganut paham Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah (Aswaja). Organisasi NU merupakan satu-satunya ormas Islam di Indonesia yang sejak zaman dahulu sangat konsisten mengukung kultur tradisional (Islam- Tradisionalis). NU secara resmi berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 [1]. NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut (Nahdliyin) berjumlah \pm 90 juta jiwa atau sekitar \pm 60% dari populasi penduduk muslim di Indonesia [2]. Sesuai dengan visi misi atau landasan pergerakan organisasi (Khittah), NU memiliki asas 3T + 1I, yaitu Tawassuth (moderat), Tawazun (toleran), Tasamuh (seimbang), dan I'tidal (tegak lurus) [3]. Berdasarkan keempat asas tersebut, NU secara de facto merupakan ormas yang berlandaskan ajaran atau paham Islam moderat. Selain itu dalam perkembangannya, NU secara de jure secara nyata melakukan gerakan di bidang agama (dakwah), pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi dengan mengedepankan prinsip toleransi dan pluralisme [4].

Tugas pokok NU sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART organisasi, maupun yang berupa keputusan final yang telah disahkan dan disepakati lewat forum rapat/musyawarah/RAKER (Rapat Kerja), ataupun berupa komando/instruksi/SK (Surat Keputusan) dari pusat yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Maka selama dan hingga saat ini terkait bagaimana peran ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) khususnya di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto meliputi berbagai macam bidang. Di bidang keagamaan NU melakukan penanaman paham ajaran agama Islam berhaluan Ahlu Sunnah wal jamaah an nahdliyah (bagi NU) di kalangan muslim/orang beragama Islam, lalu menciptakan hubungan persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama dan bahkan lintas iman, yang salah satunya adalah aktivitas pengamanan (PAM) berupa kegiatan jaga gereja khususnya pada momen natal tiap tahun. Di bidang pendidikan, NU juga memperjuangkan kemajuan dan kualitas pendidikan lewat beberapa lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, salah satunya terdapat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU), yang terdiri dari beberapa tingkat pendidikan, diantaranya Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dwi Dasa Warsa (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Thoriqul Ulum (setingkat SMP/SLTP), Madrasah Aliyah (MA) Wahid Hasyim (setingkat SMA/SMK/SLTA). Di bidang sosial kemasyarakatan, NU juga aktif mengadakan kegiatan solidaritas, empati dan kepedulian terhadap sesama (bakti sosial) dalam setiap momen, diantaranya penyaluran bantuan covid-19, penyaluran bantuan dan penanggulangan bencana alam, dan lain-lain. Di bidang tradisi dan budaya, NU juga melakukan pelestarian kebudayaan dan kesenian yang bersifat religi khususnya dalam momen hari besar (PHBI) dengan tujuan "syi'ar Islam". Di bidang ekonomi, NU juga mengadakan program "KOIN NU" sebagai satu wadah dana swadaya dan kemandirian usaha warga Nahdliyin (NU). Selain itu terdapat beberapa event pelatihan atau workshop tertentu sebagai bentuk manifestasi daripada kegiatan pengembangan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).¹

Jajaran pengurus MWC NU Kecamatan Trawas di awal tahun 2020 (tepatnya pada bulan Februari tahun 2020) mengadakan sebuah kegiatan atau acara rutin (wajib) tiap tahun berupa Rapat Kerja (RAKER) pengurus / anggota organisasi MWC NU Kecamatan Trawas. Acara tersebut kebetulan diisi dengan ceramah atau sambutan dari salah satu Pimpinan Wilayah NU Jawa Timur yang berkenan hadir dalam acara tersebut. Ceramah atau sambutan yang disampaikan berisi apresiasi terkait diadakannya acara rapat kerja tersebut. Kemudian inti daripada ceramah tersebut adalah berkaitan dengan maraknya gerakan Islam radikal di Indonesia, dan secara langsung beliau menyikapi keseluruhan fenomena radikalisme tersebut. Selain itu beliau juga menjelaskan bagaimana upaya sosialisasi gerakan Islam nusantara dilakukan beserta seluruh hambatan yang ditemui selama ini. Inti daripada keseluruhan isi ceramah tersebut adalah terkait upaya sosialisasi gerakan Islam moderat organisasi NU, dengan rangkaian substansi atau isi ceramah yang bermula dari sejarah pergerakan

¹ Wawancara dengan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, berinisial NH

organisasi NU, serta penjelasan tentang keunggulan organisasi NU dibandingkan dengan ormas Islam lain. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa adanya keberadaan atau eksistensi ormas Islam lain merupakan suatu ancaman bagi organisasi NU bahkan bagi keutuhan dan kebhinekaan NKRI. Melalui klaim sebagai ormas Islam yang paling moderat, beliau menjelaskan bahwa NU adalah ormas Islam yang terbaik dan paling benar diantara ormas-ormas Islam lain di Indonesia. Hal ini, didasari oleh suatu asumsi bahwa eksistensi serta pergerakan ormas selain NU (baik di bidang agama maupun bidang lain) merupakan suatu ancaman besar dan nyata bagi organisasi NU. Menurut beliau, ancaman tersebut salah satunya berasal dari adanya perbedaan mazhab atau aliran yang dianut (dalam agama Islam) diantara ormas Islam satu dengan yang lain. Akhir ceramah atau sambutan tersebut, beliau menyempatkan diri dengan mengajak serta menghimbau kepada seluruh peserta rapat kerja (hal ini cenderung mengarah kepada tindakan provokatif) yaitu segenap pengurus MWC NU Kecamatan Trawas untuk melakukan bai'at (sumpah) bersama. Tujuan mengambil sumpah tersebut adalah agar para kader NU lebih berperan aktif dalam membela kepentingan organisasi NU. Tujuan berikutnya adalah untuk bersaing dengan ormas Islam selain NU (khususnya yang berlabel ormas Islam radikal) di semua lini atau seluruh aspek bidang kehidupan.²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketika diwilayah publik NU menggunakan jargon dan mencitrakan diri sebagai organisasi Islam moderat, namun ketika dibelakang publik NU bersikap mengecam, menentang, serta bisa dikatakan mengutuk ormas Islam lain. Sikap kader NU tersebut, tentunya sama sekali tidak mencerminkan sikap moderat yang selalu dijargonkan oleh kader organisasi NU. Berdasarkan hal tersebut, timbul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana sesungguhnya motif para kader organisasi NU yang selama ini memakai jargon islam moderat, namun (secara diam-diam atau di belakang publik) sama sekali tidak mencerminkan atau merepresentasikan sikap dan perilaku moderat (bahkan sesama ormas Islam yang ada di Indonesia).

Pada tahun 2015 pernah ada sebuah kasus yang melibatkan 2 (dua) ormas islam di wilayah Kecamatan Trawas, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dengan salah satu anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berinisial MA, yang dikenal dengan istilah kasus “saling klaim tempat ibadah”. Permasalahan tersebut memang tidak pernah terungkap ke publik ataupun media massa, namun permasalahan tersebut sudah menjadi rahasia umum khususnya di kalangan internal pengurus organisasi NU Kecamatan Trawas. Penyebab utama konflik tersebut dikarenakan adanya kegiatan ceramah agama yang dilakukan oleh MA di sebuah tempat ibadah kecil (musholla) pada salah satu desa yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Konflik tersebut bermula ketika MA secara tidak sengaja ditunjuk oleh beberapa orang jamaah sebagai imam shalat maghrib, lalu dengan didasari hak kebebasan dalam berdakwah, MA se usai melakukan shalat secara langsung menyampaikan sebuah ceramah singkat di depan para jamaah. Kabar adanya kejadian tersebut secara cepat menyebar hingga terdengar oleh beberapa pengurus NU Kecamatan Trawas, lalu rapat atau musyawarah dilakukan untuk menyikapi kejadian tersebut, dengan didasari oleh sebuah klaim dari salah satu pengurus NU Kecamatan Trawas (yang secara kebetulan menjadi Takmir Musholla tempat kejadian tersebut) bahwa musholla tersebut adalah “milik orang NU”. Pada saat itu hampir seluruh Banom (Badan Otonom) yang menjadi underbow organisasi NU, menyatakan dukungannya dan siap untuk melakukan “perlawanan balik” atas tindakan yang dilakukan oleh MA. Bahkan pada waktu itu, Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Satkoryon Banser NU) Kecamatan Trawas menyatakan kesiapannya dan akan mengerahkan segenap “pasukannya” (pengikut/massa) untuk berjaga di depan lokasi kejadian, dengan tujuan untuk menakuti MA maupun anggota HTI lain agar menghentikan kegiatan ceramah agama di musholla tersebut. Pada akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa sedikitpun terjadi gesekan secara fisik, yaitu melalui tindakan mediasi oleh Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trawas, yang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Trawas serta pihak Pemerintah Desa setempat.³

² Hasil studi observasi awal penelitian

³ Wawancara dengan Sekretaris II MWC NU Kecamatan Trawas Kabupeten Mojokerto, berinisial MT

Adapun penelitian berjudul *“Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam”* menunjukkan hasil bahwa ormas keagamaan yang menganut paham Islam moderat di Indonesia sangat berkontribusi besar dalam hal kehidupan bertoleransi, khususnya di tingkat nasional bahkan hingga tingkat internasional. Hal ini diwujudkan dengan adanya dialog antar ormas serta kerjasama sosial keagamaan demi mewujudkan kehidupan berwarganegara yang rukun dan damai sebagai bangsa yang beradab [5]. Penelitian lain yang berjudul *“Kontestasi Identitas Islam Moderat Di Asia Tenggara”*, menjelaskan bahwa kontestasi atau persaingan identitas Islam moderat antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia timbul seiring dengan adanya perang global melawan teror. Selain itu, kedua negara tersebut masing-masing memiliki modal domestik dari karakter Islam moderat itu sendiri. Pada akhirnya upaya pencitraan Islam moderat yang dilakukan oleh kedua negara (yang tentunya dilakukan secara berbeda) dapat dilihat berdasarkan hasil atau capaian kedua negara dalam konteks pendekatan dengan dunia Barat dan dunia Islam [6]. Penelitian lain yang relevan berjudul *“A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia’s Foreign Policy”*, menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga wacana yang tercantum dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu Islam digunakan sebagai suatu identitas keagamaan atau kehidupan religius, Islam moderat down- top, yaitu dari kalangan bawah atau akar rumput (grassroot), Islam moderat merupakan salah satu strategi dari skenario perang global melawan teror [7]. Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian pertama berfokus pada bagaimana implementasi Islam moderat memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Lalu penelitian kedua berfokus pada identitas Islam moderat diantara dua negara (Indonesia dan Malaysia) dalam kancah Internasional. Lalu penelitian ketiga berfokus pada implementasi paham Islam moderat pada kebijakan luar negeri Indonesia yang terbagi dalam tiga wacana, yaitu sebagai identitas religius, Islam moderat dari bawah, dan sebagai salah satu bagian dari upaya melawan teror.

Maka novelty atau unsur kebaruan penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya pembangunan citra sebagai ormas Islam moderat dilakukan oleh para kader NU, serta bagaimana motif perilaku atau tindakan tersebut dilakukan di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Selain itu, hal yang menarik dalam penelitian ini diantaranya adalah ; Pertama, bahwa penelitian ini mengangkat topik penelitian yang bersinggungan secara langsung dengan konteks kehidupan sosial agama. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari para akademisi cenderung memiliki kekhawatiran akan resiko tertentu apabila melakukan suatu penelitian yang mengangkat topik berkonteks agama. Kedua, bahwa penelitian ini menggunakan paradigma yang berbeda daripada umumnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan penelitian sosial agama lebih cenderung menggunakan kacamata atau paradigma yang berkesan “menyetujui” atau berada pada posisi atau pihak yang sama dan searah dengan objek penelitian. Hal ini (menurut peneliti) sangat berpotensi untuk menghilangkan unsur kritisisme dalam suatu penelitian. Ketiga, bahwa fenomena tersebut dilakukan oleh kader atau anggota ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai objek penelitian atau bahan kajian. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi bahan kajian penelitian masih dianggap “tabu” oleh sebagian besar masyarakat muslim khususnya yang memiliki afiliasi dengan ormas Islam Nahdlatul Ulama. Mereka (masyarakat) menganggap bahwa apapun yang berkaitan dengan ormas yang mereka gandrungi (dalam hal ini Nahdlatul Ulama) merupakan hal yang “suci” atau “sakral” serta seolah-olah tidak boleh dibicarakan apalagi dikritisi. Maka sikap kritis atau kritisisme apapun terhadap hal tersebut seolah-olah merupakan sebuah “larangan khusus” yang sudah membudaya secara turun temurun (lintas generasi). Sehingga sangat berpotensi besar akan menimbulkan respon atau reaksi tertentu, yang merupakan buah dari paham atau sikap fanatisme dari kebanyakan masyarakat khususnya para pengikut (dari kader aktif secara struktural organisasi, anggota atau jamaah secara kultural, hingga simpatisan) ormas Islam Nahdlatul Ulama.

2. Kajian Pustaka

2.1. Konsep Moderat Nahdlatul Ulama (NU)

Berkaitan dengan topik atau tema penelitian, organisasi atau lembaga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa visi dan misi tersendiri. Visi Lembaga MWC NU Kecamatan Trawas yaitu ; Terwujudnya NU sebagai *Jam'iyah Dinriyyah Ijtima'iyah Ablussunnah wal Jama'ah an- Nahdhiyyah* yang maslahah bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri. Sedangkan misi Lembaga MWC NU Kecamatan Trawas diantaranya yaitu ; Melaksanakan dakwah Islamiyah *Ablussunnah wal Jama'ah* dalam membimbing umat menuju masyarakat yang *mutamaddin* dan berakhlakul karimah, memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas kesehatan umat,memeratakan kesejahteraan perekonomian umat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan, menumbuh kembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil, serta mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara [8].

Berdasarkan visi dan misi Lembaga MWC NU Kecamatan Trawas tersebut, tidak dicantumkan atau tertulis secara jelas tentang konsep moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas. Namun kegiatan wawancara pada saat observasi awal dengan salah satu pengurus NU Kecamatan Trawas berinisial MT (yang sampai sekarang masih bertugas sebagai Sekretaris II MWC NU Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto), menunjukkan beberapa hasil, diantaranya ; Pertama, MT membenarkan bahwa di dalam visi misi Lembaga MWC NU Kecamatan Trawas memang tidak sedikitpun menjelaskan tentang konsep moderat organisasi NU. Menurut MT hal tersebut tidak perlu dicantumkan, karena konsep moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas sudah mengacu pada konsep moderat di PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), walaupun berupa penjelasan umum (generalisir) dengan lingkup yang sangat luas (skala nasional). Disisi lain menurut MT, hampir secara keseluruhan organisasi NU tingkat kabupaten/kota hingga kebawah tidak mencantumkan secara detail hal- hal terkait konsep moderat organisasi NU. Kedua, MT menjelaskan bahwa di wilayah Kecamatan Trawas, NU menempati posisi mayoritas, sedangkan jumlah anggota ormas islam lain serta jumlah pemeluk agama lain berada di posisi minoritas. Oleh karena itu menurut MT konsep moderat organisasi NU tidak perlu ditegaskan secara detail, akan tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. MT menambahkan, bahwa selama ini aktifitas NU di Kecamatan Trawas sering menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama lain, bahkan membantu orang tersebut hingga masuk islam. Selain itu, menurut penjelasan MT bentuk manifestasi lain yang dilakukan NU terkait moderasi beragama yaitu saling gotong royong membantu pemulasaran jenazah di lingkungan tempat tinggal atau antar tetangga, sekalipun tetangga tersebut adalah non muslim (pemeluk agama lain). Ketiga, menurut MT konsep moderat Lembaga MWC NU Kecamatan Trawas diwujudkan dalam suatu sikap yang berasal dari 2 (dua) tempat, yaitu hati-pikiran dan lingkungan sosial masyarakat. MT juga memberikan satu contoh sikap moderat, yaitu bahwa sekeras apapun bentuk penolakan di dalam hati-pikiran akan hal-hal tertentu, maka ketika berada di lingkungan sosial masyarakat haruslah tetap menggunakan etika atau norma sosial yang berlaku. MT juga menambahkan bahwa sikap moderat merupakan strategi yang paling tepat, khususnya dalam aktifitas dakwah organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.⁴

Studi penelitian tentang “*Kontestasi Identitas Islam Moderat Di Asia Tenggara*”, menjelaskan bahwa kontestasi atau persaingan identitas Islam moderat antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia timbul seiring dengan adanya perang global melawan teror. Selain itu, kedua negara tersebut masing-masing memiliki modal domestik dari karakter Islam moderat itu sendiri. Pada akhirnya upaya pencitraan Islam moderat yang dilakukan oleh kedua negara (yang tentunya dilakukan secara berbeda) dapat dilihat berdasarkan hasil atau capaian kedua negara dalam konteks pendekatan dengan dunia Barat dan dunia Islam [6]. Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat ditarik suatu garis besar sebagai basis kesimpulan secara sederhana namun cukup logis atau masuk akal, bahwa kampanye islam moderat tidak semata-mata terjadi secara kebetulan, namun memang direncanakan seperti itu. Maka dalam hal ini upaya kampanye tersebut berada pada momen peristiwa yang sangat

⁴ Wawancara dengan Sekretaris II MWC NU Kecamatan Trawas Kabupeten Mojokerto, berinisial MT

tepat. Bahwa ketika masyarakat dunia sedang mengalami duka dan trauma semenjak maraknya aksi terorisme, khususnya yang memakai label agama islam sebagai topeng selubung atau kambing hitam, yang mengakibatkan munculnya “islamophobia” atau ketakutan terhadap segala jenis dan bentuk hal apapun yang berbau agama islam (bahkan identic dengan corak budaya timur tengah), ormas islam Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu pelopor yang berada di garda terdepan dalam upaya kampanye islam moderat. Sebagai akibat daripada rangkaian momen dan fenomena di tingkat global atau internasional, maka upaya pencitraan islam moderat secara jelas memang disetting untuk tujuan tersebut, yakni sebagai serangan balik untuk meredam atau mengkonter dampak daripada maraknya aksi terorisme global. Hal ini dikarenakan aksi terorisme khususnya yang memakai label serta untuk mendiskreditkan agama islam, tidak hanya mengguncang stabilitas pertahanan dan keamanan suatu negara saja, namun juga berdampak buruk terhadap citra umat atau orang islam. Maka dengan memperburuk dan menghancurkan citra agama islam di tingkat global, baik secara langsung atau tidak langsung atau bertahap, akan melahirkan stigma atau persepsi negative terhadap citra agama islam dengan ditambah bekas luka trauma dan ketakutan yang mendalam bagi tiap individu, yang pada akhirnya dikenal dengan istilah “islamophobia”.

Studi penelitian tentang "*A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy*", menunjukkan hasil bahwa terdapat tiga wacana yang tercantum dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu Islam digunakan sebagai suatu identitas keagamaan atau kehidupan religius, Islam moderat down- top, yaitu dari kalangan bawah atau akar rumput (grassroot), Islam moderat merupakan salah satu strategi dari skenario perang global melawan teror [7]. Berdasarkan hasil kajian penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini esensi daripada penerapan konsep islam moderat lahir dari situasi dan kondisi sosial masyarakat yang bersifat “down-top”. Islam moderat lahir dari tataran level terendah atau level akar rumput (grassroot) sebagai akibat dari kondisi sosio kultural religious yang sangat multicultural. Berawal daripada kondisi keberagaman masyarakat tersebut menimbulkan sikap toleransi yang besar hingga lahirlah paham moderasi atau moderat khususnya di bidang keagamaan. Di sisi lain dalam scenario perang global melawan terorisme, hanya dengan mengkampanyekan paham serta gerakan islam moderat lah yang merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh secara berkelanjutan, tidak hanya untuk “kontra” terror, namun juga untuk memperbaiki citra buruk dan mengembalikan nama baik umat dan label agama islam yang telah tercoreng oleh aksi terorisme.

2.2. Teori Motif Sosial Alfred Schutz

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Menurut Schutz, fenomenologi adalah cara untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana perilaku atau tindakan sosial manusia dalam rentang waktu masa lalu, sekarang atau masa kini, dan masa mendatang (masa depan) dengan menggunakan suatu penafsiran. Dalam artian atau pemahaman lain, yaitu memahami suatu tindakan sosial manusia melalui konteks pengalaman, makna, dan kesadaran. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia mempunyai tuntutan untuk dapat saling memahami satu sama lain di dalam suatu kesamaan realitas (kenyataan). Proses ini akan menghasilkan hubungan timbal balik antar individu, pemahaman yang dihasilkan oleh pengalaman bersama, dan tipikasi terhadap dunia bersama. Menurut penjelasan lain, Schutz menjadikan manusia sebagai "aktor", yang membentuk atau menghasilkan suatu makna subjektif dalam kehidupan sosial berupa "kesamaan" dan "kebersamaan", yang akhirnya disebut intersubjektif. Hal ini dikarenakan berdasar pada pengalaman individu (khususnya berkaitan dengan ketiga rentang waktu tersebut), maka bangunan pemahaman adalah murni dari apa yang dialami oleh individu tersebut. Menurut Schutz, korelasi antara individu dengan kehidupan sosial merupakan sesuatu yang intersubjektif berupa keseluruhan pengalaman hidup yang penuh dengan makna. Maka dalam hal ini, makna daripada tindakan sosial manusia sangat identic dengan motif yang melatarbelakangi atau menjadi dasar dilakukannya tindakan sosial tersebut. Menurut Schutz, motif dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu In Order To Motive dan Because Motive. In Order To Motive, yaitu motif yang mengacu pada tindakan di masa yang akan datang (masa depan). Fokus daripada motif ini adalah pada tujuan yang telah ditetapkan

oleh individu dalam melakukan suatu tindakan sosial. Sedangkan *Because Motive*, yaitu motif yang mengacu pada tindakan di masa lalu (masa lampau). Fokus daripada tindakan ini adalah pada alasan mengapa tindakan sosial tersebut dilakukan [9]. Schutz memisahkan antara motif dan makna. Makna berhubungan dengan sikap aktor dalam menentukan hal yang paling penting daripada kehidupan sosialnya. Sedangkan motif berhubungan dengan alasan aktor dalam melakukan suatu tindakan sosial. Motivasi tersebut akan sangat berperan dan berpengaruh dalam menentukan tindakan apapun yang dilakukan oleh aktor. Dalam melakukan suatu tindakan sosial, maka aktor hanya akan menjadi suatu bentuk kesadaran berdasarkan motif yang menjadi tujuan dilakukannya tindakan sosial tersebut, dan bukan berdasarkan motif yang menjadi sebab mengapa tindakan sosial tersebut dilakukan. Individu akan menemukan kesadaran yang sesungguhnya setelah melakukan (menyelesaikan) tindakan tersebut, yang diperolehnya melalui suatu refleksi. Namun menurut Schutz, aktor tersebut sudah tidak melakukan tindakan sosial lagi, karena aktor tersebut (saat itu) sedang menjadi pengamat terhadap dirinya sendiri [10]. Menurut pandangan Schutz jika dikaitkan dengan fenomena penelitian, maka penelitian berfokus pada perilaku/tindakan individu sebagai aktor sosial, dalam hal ini adalah para anggota/kader organisasi NU, yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Hal ini dikarenakan siklus pengalaman, makna, dan kesadaran dalam melakukan suatu tindakan sosial melekat pada individu sebagai aktor sosial. Walaupun para anggota/kader organisasi NU bertindak atas nama organisasi, namun pada kenyataannya para kader organisasi-lah yang melakukan semua tindakan sosial. Oleh karena itu, label atas nama organisasi NU pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perilaku/tindakan sosial yang dilakukan oleh para anggota/kader organisasi NU sebagai aktor sosial. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam terkait fenomena penelitian melalui berbagai macam penafsiran yang dikemukakan oleh setiap subjek penelitian. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan makna yang bersifat subjektif diantara para subjek penelitian, walaupun secara keseluruhan para subjek penelitian mempunyai kesamaan realitas. Melalui acuan 3 (tiga) rentang waktu (yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan) akan menghasilkan bangunan pemahaman yang sangat murni dari pengalaman hidup yang orisinal (otentik) serta bersifat “intersubjektif”. Selanjutnya dari pengalaman hidup yang dialami para subjek penelitian (para kader/anggota organisasi NU) tersebut, akan dapat diketahui bagaimana makna perilaku/tindakan sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian. Hal ini seperti kata Schutz, makna tindakan subjek tersebut merupakan sesuatu yang paling penting dalam melakukan suatu perilaku/tindakan sosial. Berdasarkan makna tersebut akan diketahui untuk apa tindakan tersebut dilakukan. Maka disitulah terdapat “motif sosial”. Hal ini mengacu pada pengkategorian 2 (dua) macam motif sosial menurut Schutz jika dikaitkan dengan fokus penelitian, maka penelitian berusaha mendalami bagaimana motif para kader/anggota organisasi NU dalam membangun citra sebagai ormas islam moderat. Secara detail hal yang dipertanyakan adalah bagaimana *Because Motive* (motif tujuan) serta bagaimana *In Order To Motive* (motif sebab) para kader/anggota NU dalam membangun citra sebagai ormas islam moderat. Penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi, pada dasarnya adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara tidak memalsukan fenomena, lalu mendeskripsikannya tanpa prasangka, menanggalkan segenap teori, pra anggapan serta prasangka tertentu, dan menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Hal ini dikarenakan realitas dunia tidak cukup diketahui melalui metode observasi belaka, namun juga harus melalui metode pemahaman atau “*verstehen*”. Agar supaya tahu, proses penelitian harus masuk terlebih dahulu untuk dapat menjelaskan. Lalu untuk menjelaskannya, maka harus memahami. Lalu untuk memahaminya, maka proses penelitian harus bisa berpartisipasi dan harus terlibat dalam suatu “proses” yang menghasilkan realitas dari dunia kehidupan tersebut. Poin terakhir terkait penggunaan teori dalam penelitian kualitatif, adalah berfungsi sebagai “bingkai” daripada penelitian tersebut. Maka dalam artian lain, bukan bertujuan untuk membuktikan atau menguji kebenaran daripada suatu teori tertentu, namun teori tersebut hanya digunakan sebagai “petunjuk jalan” dalam suatu penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang melihat suatu fenomena dalam masyarakat melalui sebuah pengamatan secara deskriptif [11].

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam studi penelitian ini antara lain melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil subjek penelitian dengan beberapa kriteria atau ketentuan diantaranya ; merupakan warga NU (Nahdliyin) yang berdomisili (bertempat tinggal) di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki rentang usia 18-60 tahun. Penggunaan ketentuan atau kriteria pemilihan subjek penelitian tersebut didasarkan pada beberapa faktor alasan, yaitu ; Pertama, topik penelitian ini membahas dan mengkaji tentang ormas islam NU. Kedua, faktor jenis kelamin akan menentukan bagaimana persepsi atau pemaknaan individu sebagai subjek. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan dalam memahami dan memaknai suatu fenomena tertentu antara subjek laki-laki dengan subjek perempuan, khususnya berkaitan dengan kesempurnaan informasi yang sampai kepada diri subjek. Ketiga, faktor usia juga sangat penting, karena berhubungan dengan daya/memori ingatan subjek. Maka hal ini sangat berdampak positif bagi jalannya proses awal hingga akhir penelitian.

Studi penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Mojokerto. Studi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan diantaranya ; Pertama, lokasi ini memang bukan lokasi utama yang menjadi tempat terjadinya fenomena awal penelitian. Namun lokasi ini merupakan tempat yang sangat berhubungan erat dengan fenomena penelitian yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan lokasi atau tempat para subjek melakukan segala aktivitas atau kegiatan organisasi NU. Maka hal ini akan memudahkan proses penggalian data atau informasi berkaitan dengan bagaimana motif para kader/anggota organisasi NU dalam melakukan upaya pembangunan citra sebagai ormas Islam moderat. Kedua, karena lokasi ini merupakan basis tempat tinggal para subjek penelitian, yaitu dalam hal ini para subjek penelitian berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

4. Temuan dan Diskusi

4.1 Strategi dan Penerapan Moderasi Beragama Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

4.1.1 Penerapan Moderasi Beragama MWC NU Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian, maka menurut penjelasan para subjek penelitian bahwa penerapan moderasi beragama yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam hal ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Maka dalam hal ini upaya penerapan moderasi beragama tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah mengakar di dalam organisasi NU. Menurut para subjek penelitian, salah satu bukti adanya penerapan perilaku moderasi beragama yaitu kegiatan pengamanan (PAM) di salah satu gereja (yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Trawas) pada saat momen hari Natal yaitu pada tanggal 25 Desember tiap tahun. Selain itu menurut penjelasan salah satu subjek penelitian yaitu saudara Sifa, ia menjelaskan bahwa memang sudah seharusnya kaum atau golongan yang berada pada posisi mayoritas atau yang mendominasi, haruslah melindungi, menjaga, dan mengayomi kaum atau golongan yang minoritas, dan bukan sebaliknya. Berkaitan dengan latarbelakang mengapa upaya penerapan moderasi beragama tersebut dilakukan, diantaranya adalah dikarenakan persamaan sebagai sesama manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, persamaan nasib sebagai sesama warga negara Indonesia, serta karena komitmen sebagai warga negara yang senantiasa berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI. Strategi penerapan moderasi beragama yang sudah dilakukan oleh organisasi NU khususnya di wilayah Kecamatan Trawas, diantaranya dilakukan dengan cara senantiasa menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan baik di seluruh lapisan masyarakat.

Studi penelitian berjudul "*Islamic Moderation Values on the Islamic Education Curriculum in Indonesia: A Content Analysis*" menunjukkan hasil bahwa perilaku moderasi islam tidak diwujudkan secara normatif atau legal-formal, namun dimanifestasikan dalam bentuk "value" atau berwujud nilai-nilai substansial melalui tema-tema umum seputar kehidupan toleransi, demokrasi, dan kerukunan. Penerapan nilai-nilai substansial tersebut hingga pada konteks penyusunan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia sangatlah berkembang, seiring dengan adanya kekhawatiran terhadap perkembangan akan gerakan ekstremis, intoleran, dan radikalisme-terorisme di dalam dimensi lembaga pendidikan. [12]

Berdasarkan studi atau kajian penelitian tersebut dengan melihat, mengamati, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, maka implementasi perilaku moderasi beragama tidak bisa ditempuh atau dilaksanakan secara normative atau legal-formal. Hal ini dikarenakan implementasi yang dilakukan secara normative atau berbentuk legal-formal akan berwujud sangat formal dan terkesan sangat kaku. Sebagai contoh pada penerapan suatu kebijakan tertentu yang telah diputuskan atau disahkan oleh pemerintah. Proses aktualisasi kebijakan tersebut sekecil apapun bobot urgensinya akan berdampingan atau beriringan dengan beberapa aturan-aturan tertentu yang menyertainya sebagai pelindung daripada keabsahan atau legitimasinya, serta pondasi penopang bagi otoritas atau legalitasnya. Maka secara otomatis respon daripada seluruh lapisan masyarakat akan condong kearah tertekan atau keterpaksaan. Selanjutnya masyarakat secara langsung akan mengabaikan nilai-nilai substansi dan esensinya. Masyarakat akan menerapkan dan mengimplementasikannya dengan tanpa berdasarkan kesadaran sosio-kolektifitasnya, namun berdasarkan represifitas dan resistensi yang dilatarbelakangi oleh ketakutan, kekhawatiran, serta kecemasan akan konsekuensi hukuman atas kelalaian mereka walaupun diluar kesengajaan diri mereka sendiri. Di sisi lain, paham atau konsep gerakan islam moderat sangat bersifat substansial dan esensial dengan menjunjung tinggi kekuatan dan ikatan nilai-nilai sosial (social value). Maka dalam hal ini paham atau konsep islam moderat tidak dapat dipahami dan diterapkan hanya dengan atau melalui pengetahuan logika yang bersifat leterlek atau textbook, dikarenakan akan lebih banyak melahirkan pemahaman teoritis belaka dan nihil dalam aksi serta aktualisasinya. Paham atau konsep islam moderat harus ditancapkan di alam pikiran pengetahuan, kemudian tumbuh dalam kesadaran pola pikir dan naluri, serta tersembunyi dalam perwujudan atau manifestasi dari dan dalam bentuk suatu perilaku atau interaksi sosial tertentu.

4.1.2 Konsep Islam Moderat MWC NU Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian terkait pemahaman tentang konsep islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), maka dalam hal ini para subjek menjelaskan bahwa konsep islam moderat dalam bentuk pandangan atau pemikiran yaitu ; konsep beragama islam yang berada di tengah (tidak ekstrim kanan maupun kiri), serta tidak boleh ada ekstrimitas atau diskriminasi terhadap sesama manusia, apapun latarbelakangnya. Kemudian ketika diimplementasikan dalam bentuk sikap yaitu ; bersikap luwes atau fleksibel dan tidak bersikap kaku dan agresif dalam hal beragama, serta harus menjaga kebangsaan, menerima segala perbedaan dan keberagaman, juga tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat, kearifan dan kebudayaan lokal.

Studi penelitian berjudul "*Islam Nusantara : Moderasi Islam Di Indonesia*", menunjukkan hasil bahwa paham agama Islam di Indonesia mempunyai lima karakter, yaitu paham atau konsep Islam Nusantara sangat dan selalu relevan dengan konteks perkembangan zaman, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap seluruh perbedaan dalam konteks keberagaman agama, keyakinan, dan kepercayaan. Selain itu, paham Islam Nusantara memberikan ruang bagi tradisi yang sudah ada di masyarakat, dalam artian sangat menghormati dan menghargai adat istiadat serta tradisi budaya lokal yang sudah ada secara turun temurun dan lintas generasi. Fakta menunjukkan bahwa paham Islam Nusantara sangat progresif terhadap perkembangan dan kemajuan zaman, serta memiliki sifat "membebaskan" (baik secara pemikiran maupun sikap atau tindakan). [13]

Berdasarkan studi kajian penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait relevansi serta progresifitas daripada paham atau konsep islam nusantara dengan konteks perkembangan zaman merupakan suatu ketetapan atau keniscayaan daripada sistem hukum alam. Hal ini dikarenakan pondasi dasar yang melahirkan paham atau konsep islam nusantara memang dari awal mula dicetuskannya ide dan gagasannya tersebut sudah berbentuk atau bersifat “paten”. Paham atau konsep islam nusantara memang berangkat daripada naluri kesadaran kolektif masyarakat yang berada dalam kondisi sosial multicultural. Maka untuk kasus atau konteks negara atau bangsa Indonesia mulai zaman dahulu sampai detik ini pun kondisi sosial masyarakat masih dalam kondisi multicultural atau hidup dalam keberagaman. Kondisi keberagaman masyarakat itulah yang menjadi salah satu faktor munculnya ide atau gagasan atau konsep atau paham islam nusantara. Maka selama kondisi sosial masyarakat di negara Indonesia masih bertahan dalam kondisi sosial multicultural maka pondasi dasar daripada paham atau konsep islam nusantara tersebut sampai kapanpun tidak akan berubah. Di sisi lain terkait progresifitas daripada paham atau konsep islam nusantara terhadap perkembangan dan kemajuan zaman, hal ini tidak bisa dilepaskan daripada relevansinya sebagaimana yang telah diuraikan di awal. Bahwa selama kondisi multicultural masyarakat di Indonesia masih ada, maka paham atau konsep islam nusantara secara pasti akan masih ada dan akan bertahan sampai kapanpun (terkecuali jika terjadi disintegrasi atau konflik sosial yang memecah persatuan dan kesatuan NKRI). Kemudian selama paham atau konsep islam nusantara masih relevan dengan perkembangan zaman, maka pondasi dasar tersebut akan menjadi prinsip dasar kehidupan sekaligus cita-cita bersama, lalu ketika sudah menjadi cita-cita dan tujuan bersama maka ia akan menuntun setiap langkah individu atau seseorang untuk menuju kearah cita-cita dan tujuan bersama tersebut, maka baik sadar atau tidak bahkan sengaja atau tidak secara otomatis setiap langkah dan upaya sekecil apapun akan berjalan secara progresif dengan sendirinya, karena memang sedari awal memulai upaya dan langkah sudah memiliki target atau sasaran yang jelas yaitu kearah cita-cita dan tujuan tersebut yang telah dikehendaki bersama. Selanjutnya paham atau konsep islam nusantara sangat menjunjung tinggi sikap toleransi yang merupakan suatu kewajiban bahkan melekat menjadi kebiasaan atau habitus kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan sikap toleransi tersebut merupakan suatu konsekuensi tetap, suatu bentuk manifestasi daripada upaya adaptasi dan penyesuaian dalam menjalani kehidupan sosial di lingkungan keberagaman, karena tidak mungkin atau mustahil manusia menjalani kehidupan sosial secara berdampingan dan saling mengerti dan memahami perbedaan dan keberagaman satu sama lain tanpa adanya sikap toleransi dan menghargai sesama. Maka konsekuensinya adalah menerima, menghargai, menghormati, dan memberi ruang segala bentuk apapun kearifan local (local wisdom), adat istiadat, tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dan tetap dilestarikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak mungkin atau mustahil seorang individu akan membuang dan menolak semua itu. Maka sesuai dengan istilahnya yakni islam “nusantara” termasuk lah di dalamnya berbagai macam bentuk kearifal local yang diciptakan dari hasil akal budi (kebudayaan) daripada kehidupan masyarakat itu sendiri. Poin terakhir yaitu bahwa paham atau konsep islam nusantara memiliki sifat “membebaskan”, baik secara pemikiran maupun sikap atau tindakan. Hal ini dikarenakan pada satu sisi paham atau konsep islam nusantara merupakan bungkus atau kemasan daripada islam moderat itu sendiri, yang memiliki prinsip dasar moderat, tidak condong atau berat sebelah atau di salah satu sisi. Jika memang itu terjadi maka hal tersebut sudah keluar daripada “koridor” atau batas ke”moderat”an atau moderasi, dan disadari atau tidak sudah masuk atau termasuk dalam wilayah ekstrem atau radikal. Di sisi lain dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman, yang menghilangkan sekat-sekat fanatisme dan pola pikir konservatif.

4.1.3 Hubungan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan Umat Agama Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian terkait sikap dan pandangan para subjek terhadap umat agama lain, yaitu bahwa dari sisi pandangan pribadi tidak boleh memaksa umat agam lain dalam masalah keyakinan beragama. Hal ini dikarenakan di dalam aturan agama islam sendiri tidak boleh ada sedikitpun paksaan orang dalam memeluk agama tertentu. Selain itu hal tersebut juga dijamin dalam undang- undang bahwa negara menjamin hak kebebasan dalam memilih

agama dan keyakinan masing-masing warga negara Indonesia. Namun di sisi lain terdapat suatu pengecualian, semisal ketika umat agama lain tersebut memang memiliki niatan atau berminat untuk masuk agama islam, maka kita harus senantiasa membantu dan memfasilitasi mereka. Kemudian secara sikap harus saling menghormati, saling membantu dalam hubungan sosial dengan dasar hubungan sesama manusia (ukhuwah basyariah) dan hubungan sesama warga negara (ukhuwah wathaniyah).

Berkaitan dengan konteks tersebut khususnya tentang menjalin hubungan dengan komunitas umat agama lain, NU selalu terlibat aktif dalam setiap kegiatan dialog antar umat beragama, serta selalu menyampaikan aspirasinya berupa ide-ide dan gagasan tentang agama perdamaian dan pluralism lewat forum-forum dialog kebangsaan.

4.2 Pandangan MWC NU Terhadap Eksistensi Ormas Islam Lain

4.2.1 Hubungan MWC NU dengan Sesama Ormas Islam Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian terkait hubungan organisasi NU dengan ormas islam lain, ditemukan bahwa terdapat berbagai macam respon dan pandangan dari para warga Nahdliyin (NU), baik yang menempati posisi atau jabatan di dalam struktur kepengurusan MWC NU Kecamatan Trawas, maupun di lapisan kultural masyarakat wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan para subjek saling mengungkapkan pandangannya masing-masing terkait bagaimana hubungan para subjek sebagai warga NU dengan ormas islam lain yang ada di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, yang tidak lepas dari posisi masing-masing subjek dalam aktivitas di kehidupan sehari-hari sebagai warga NU. Bagi warga NU structural yang saat ini sedang aktif di struktur kepengurusan MWC NU Kecamatan Trawas, dalam hal ini saudara Azis, Johan, dan Sifa. Menurut penjelasan ketiga anggota structural MWC NU Kecamatan Trawas tersebut, hubungan organisasi NU dengan ormas islam lain yang ada di wilayah Kecamatan Trawas cukup baik, salah satu alasannya dikarenakan adanya persamaan yang mendasar antara organisasi NU dengan ormas islam lain, yaitu sama-sama berlatarbelakang agama islam. Maka dari itu mereka sebagai warga NU menyimpulkan bahwa adanya ormas islam lain beserta seluruh eksistensinya di wilayah Kecamatan Trawas sama sekali bukanlah merupakan suatu ancaman yang berarti. Mereka pun mengungkapkan juga bahwa kendala permasalahan antara ormas islam NU dengan ormas islam lain adalah pada perbedaan dalam pilihan dalil pedoman keagamaan, dan pada perbedaan dalam pilihan cara atau metode dakwah, serta perbedaan label organisasi. Pokok permasalahan inilah yang pada akhirnya memberikan suatu pengaruh yang cukup signifikan, khususnya dalam hal hubungan dialog dan komunikasi antar sesama ormas islam.

Studi penelitian tentang *"Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam"*, menunjukkan hasil bahwa ormas keagamaan yang menganut paham Islam moderat di Indonesia sangat berkontribusi besar dalam hal kehidupan bertoleransi, khususnya di tingkat nasional bahkan hingga tingkat internasional. Hal ini diwujudkan dengan adanya dialog antar ormas serta kerjasama sosial keagamaan demi mewujudkan kehidupan berwarganegara yang rukun dan damai sebagai bangsa yang beradab [5].

Urgensi daripada proses dialog dan komunikasi antar ormas islam merupakan salah satu hal yang seringkali orang menganggapnya "kecil" atau "remeh", namun kenyataan dan fakta di lapangan menunjukkan hasil yang cukup luar biasa. Proses atau kegiatan dialog dan komunikasi atau silaturahmi antar ormas islam merupakan wujud nyata dari suatu bentuk kontribusi kecil dalam hal kehidupan toleransi, baik di tingkat nasional hingga tingkat internasional. Dengan adanya kegiatan dialog tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu bentuk hubungan kerjasama antar ormas islam, baik di bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga di semua lini atau sisi kehidupan demi memperjuangkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi keseluruhan khususnya bagi orang islam (muslim) itu sendiri.

Oleh karena itu seperti yang diungkapkan oleh saudara Azis melalui ungkapan “gampang-gampang susah”, yang kurang lebih memiliki makna bahwa penentuan arah tujuan akhir agar bias ketemu dan menjadi satu sudah jelas dan final, namun proses menempuh perjalanan untuk bias sampai kearah tujuan akhir tersebut cukup susah. Maka dari itu menurut ketiga subjek tersebut sikap yang dinilai cukup bijaksana terkait permasalahan tersebut adalah dengan tetap bersikap moderat. Hal ini dikarenakan masing-masing ormas islam sama-sama mempunyai landasan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Maka tidak ada alasan bagi warga NU untuk mencampuri, mengusik, dan mengintervensi wilayah internal organisasi ormas islam lain, selama kegiatan yang dilakukan oleh ormas-ormas islam di luar NU tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, lalu tidak membuat kegaduhan atau saling menjaga keamanan dan ketertiban, serta berdampak positif bagi masyarakat luas.

Studi penelitian tentang “*Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto*”, menunjukkan bahwa tindakan FPI Mojokerto memperlihatkan penentangannya terhadap hukum negara. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya komunikasi dua arah atau lebih dalam memberantas tempat- tempat yang dianggap oleh FPI maksiat. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah peraturan sendiri dengan berdasarkan dalil-dalil agama yang juga mereka tafsirkan sendiri untuk melegitimasi setiap aksi dan tindakannya. Sedangkan dalam hal politik, FPI memiliki tujuan pemberlakuan syariah Islam. Dalam pandangan FPI, syariah Islam bisa dijadikan solusi ketika Indonesia mendapat berbagai masalah. Akan tetapi, hal itu justru bertentangan dengan hukum negara Indonesia, sebab Indonesia sudah memiliki hukum dan ideologi sendiri. Proyeksi seperti itu justru ingin meruntuhkan sistem politik mapan yang sudah dibangun di negara ini. [14]

Berdasarkan hasil studi atau kajian penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa poin garis besar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh para subjek penelitian, bahwa tidak ada alasan bagi warga NU untuk mencampuri, mengusik, dan mengintervensi wilayah internal organisasi ormas islam lain khususnya terkait aktifitas ormas islam lain, mengingat tiap kelompok organisasi atau ormas islam pasti mempunyai landasan dasar pada setiap kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi hal tersebut menjadi benar adanya jika tidak keluar dari koridornya, yaitu selama kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh ormas-ormas islam di luar NU tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, lalu tidak membuat kegaduhan atau saling menjaga keamanan dan ketertiban, serta berdampak positif bagi masyarakat luas. Namun dalam kasus tersebut, FPI secara jelas sudah keluar dari batas-batas koridor tersebut. FPI secara jelas membuat dan memutuskan pelaksanaan agenda kegiatan “sweeping” secara sepihak. Maka dalam hal ini FPI secara jelas telah melanggar hukum negara, dengan tidak berkoordinasi dengan pihak penegak hukum yang berwenang. Bahkan FPI menggunakan dalil-dalil agama sebagai dasar pembelaan atas aktifitas atau kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak FPI mempertentangkan antara dalil aturan hukum negara dengan dalil agama yang mereka tafsirkan sendiri, selama konteks dan nilai substansi daripada dalil agama tersebut memiliki tafsir yang sangat politis serta mendukung perilaku apapun yang dilakukan sesuai dengan keinginan, kemauan, dan agenda kegiatan pihak FPI. Poin selanjutnya yaitu FPI telah menyebabkan kegaduhan yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Walaupun pihak yang terkena sweeping memang melakukan kesalahan, namun FPI atau bahkan ormas-ormas lain sama sekali tidak mempunyai alasan yang logis dengan membuat kegaduhan tersebut. Bahkan pada dasarnya FPI tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam melakukan aksi sweeping tersebut.

Selanjutnya bagi warga NU non structural atau yang mempunyai keaktifan pada lapisan kultural, mempunyai pandangan yang agak berbeda. Salah satunya menurut saudara Tohari, bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh ormas islam lain tersebut berdampak buruk dan sangat merugikan bagi organisasi NU. Maka dalam hal ini jika ditarik kembali pada kasus FPI tersebut terdapat beberapa pertimbangan, yaitu dari segi lingkungan atau wilayah dan segi sosio kultural. Bahwa tempat-tempat yang terkena sweeping pada dasarnya juga merupakan wilayah ormas-ormas islam lain. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan sweeping FPI akan menyebabkan kegaduhan yang

berimbang terhadap eksistensi atau keberadaan ormas-ormas islam lain. Kemudian dari sisi sosio kultural, bahwa pihak yang terkena sweeping tidak hanya dari pihak tempat-tempat tersebut saja, karena tidak menutup kemungkinan beberapa elemen masyarakat yang ikut terkena sweeping merupakan anggota daripada organisasi atau ormas islam lain. Maka kegiatan sweeping tersebut tidak hanya tuntas atau berhenti di wilayah tersebut saja, namun individu atau masyarakat sekitar pun juga terkena dampaknya. Hal ini juga berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh organisasi NU untuk menggerakkan para kader atau anggota organisasi NU untuk aktif di dunia media sosial, serta tujuannya agar dapat menyaingi dan mengkonter hoax daripada gerakan radikalisme di dunia maya atau digital. Hal ini berasal dari suatu pertimbangan terkait lemahnya pemahaman warga NU kultural tentang pergerakan ormas islam lain, yang berpotensi berakibat buruk salah satunya berupa stigmatisasi negatif bagi kelompok masyarakat itu sendiri dikarenakan begitu mudahnya ikut bergabung dengan ormas islam lain.

Studi penelitian tentang “*Analisis Wacana Kritis terhadap Teks Berita Pembakaran Bendera Berlafal Tauhid pada Media Online Suara-islam.com*”, menyimpulkan bahwa dalam segi teks, isu pembakaran bendera berlafal Tauhid memiliki citra yang buruk. Pembakar dikategorikan sebagai anti-Islam, anti-kalimat tauhid, penista agama, menghina bendera umat Islam, dan mempersekusi Islam. Dalam segi kognisi sosial, *suara-islam.com* memandang isu pembakaran bendera berlafal Tauhid dengan rasa miris. Menurut *suara-islam.com*, perilaku tersebut mencerminkan kebencian pada kalimat Tauhid dan tidak mencerminkan representasi dari “Islam Nusantara”. Sedangkan dalam konteks sosial, terdapat ancaman nyata dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mencari momentum untuk kembali eksis di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan ini memberikan peluang pada pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia. [15]

Berdasarkan hasil studi atau kajian penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa poin utama dalam kasus tersebut yaitu terkait “kekuatan media sosial”. Maka dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh organisasi NU untuk menggerakkan para kader atau anggota organisasi NU untuk aktif di dunia media sosial, serta tujuannya agar dapat menyaingi dan mengkonter hoax daripada gerakan radikalisme di dunia maya atau digital. Namun lebih daripada itu khususnya dalam konteks dunia maya dan media sosial digital, bahwa NU mempunyai agenda lain yaitu dengan terlibat aktif di dunia media sosial, maka selain daripada tujuan-tujuan utama tersebut, NU juga berupaya untuk membersihkan nama baik organisasi NU, serta untuk mengembalikan atau memperoleh kembali citra baik atau citra positif pada diri organisasi NU mengingat statusnya sebagai organisasi atau ormas islam yang melabeli dirinya sendiri sebagai ormas islam moderat, pun beserta paham atau konsep ajaran atau prinsip moderasi beragama atau islam moderat yang dibungkus dan dikemas dengan label “Islam Nusantara”.

4.2.2 Riwayat Kasuistik Antara Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan Ormas Islam Lain Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Beberapa kasus atau permasalahan yang pernah terjadi antara ormas islam NU dengan ormas islam lain yang ada di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menurut penjelasan para subjek, diantaranya ;

- a. Pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh ormas islam HTI di puncak Gunung Penanggungan
- b. Anggota HTI di lingkungan masyarakat pada suatu momen resepsi pernikahan membuat tradisi atau budaya baru, yaitu pemisahan antara tempat duduk rombongan pengiring pengantin pria dan wanita dengan alasan bukan muhrim
- c. Anggota ormas islam lain menawarkan bantuan atau kerjasama suplai dana untuk perbaikan ekonomi dan modal usaha pedagang pasar tradisional (UMKM), target sarannya adalah warga

NU kultural, imbal baliknya para pedagang tersebut harus masuk jadi anggota atau minimal simpatisan ormas islam lain tersebut

- d. Seorang guru wanita di salah satu MI mengajarkan kepada para siswanya dengan cara yang kurang tepat, salah satunya mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid di depan kelas saat mengajar
- e. Salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Trawas diketahui mengadakan kegiatan keagamaan di dalam lingkungan ponpes yang bekerjasama dengan ormas islam yang terindikasi radikal
- f. “Klaim kepemilikan” salah satu tempat ibadah (musholla) di salah satu desa di wilayah Kecamatan Trawas antara NU vs HTI
- g. Pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat atau lembaga pendidikan mirip seperti pondok pesantren yang digunakan sebagai lembaga pendidikan dan kegiatan keagamaan diduga milik perkumpulan atau komunitas atau ormas tertentu yang cenderung kearah radikal/ekstrem dengan status tidak resmi (tidak tercatat di database lembaga pendidikan agama setempat) dan masih dalam proses pelacakan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Babinsa dan Babinkamtibmas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto⁵

Berdasarkan uraian poin-poin tersebut menunjukkan fakta bahwa fenomena-fenomena tersebut merupakan hal-hal yang selama ini mendapat respon an penyikapan dari organisasi NU khususnya dari pihak MWC NU Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Dari kesekian poin-poin tersebut bukan hanya merupakan fenomena biasa yang terjadi dan berlalu belaka, namun sudah menjadi permasalahan yang dinilai cukup besar yang secara urgen harus segera disikapi dengan tegas. Maka hal ini menunjukkan bagaimana organisasi atau ormas islam NU melakukan atau menjalin hubungan dengan ormas islam atau keagamaan lain khususnya di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

4.2.3 Respon Terhadap Program Pemerintah Dalam Penanganan Radikalisme

Maka dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian terkait respon terhadap program pemerintah dalam penanganan radikalisme (deradikalisasi), bahwa para subjek secara keseluruhan menyatakan persetujuan dan dukungannya terhadap pelaksanaan program deradikalisasi pemerintah. Selain itu para subjek saling mengungkapkan alasan dukungannya masing-masing, diantaranya ;

- a. Karena pemerintah menggandeng pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu mitranya. Maka seluruh banom yang menjadi underbow organisasi NU dari tingkat nasional (Pengurus Besar) hingga pelosok wilayah terbawah (Pimpinan Anak Ranting) harus mengikuti segala instruksi dari PBNU
- b. Karena sebagai warga negara yang senantiasa taat kepada aturan pemerintah, serta sebagai santri yang wajib mengikuti para kiai
- c. Karena sinergi antar kelompok sangat penting sebagai tonggak utama lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
- d. Karena banyak warga NU di lapisan kultural yang digerogeti secara perlahan oleh ormas- ormas islam lain, terutama ormas islam yang radikal atau terlarang

⁵ Wawancara dengan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, berinisial NH

- e. Karena dalam hal ini berhadapan dengan ormas islam terlarang, melalui proxy war atau perang pemikiran berupa opini, sudut pandang, serta serangan hoax. Selain itu hoax yang kebiasaan pengucapannya diulang-ulang maka akan dianggap sebagai suatu kebenaran

Pada poin A diatas tertulis, “Karena pemerintah menggandeng pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu mitranya. Maka seluruh banom yang menjadi underbow organisasi NU dari tingkat nasional (Pengurus Besar) hingga pelosok wilayah terbawah (Pimpinan Anak Ranting) harus mengikuti segala instruksi dari PBNU”. Pada poin tersebut jika dilihat secara mendalam, maka sangat sarat akan unsur politik, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, karena sudah mengakar budaya dalam kurun waktu yang cukup lama, dan kemungkinan sudah tercantum atau tercatat dalam ukiran riwayat sejarah.

Studi penelitian berjudul *“Ulama Sebagai Kekuatan Politik: Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015”*. Penelitian ini menganalisa ulama sebagai kekuatan politik terhadap kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015. Ulama yang sebelumnya kita kenal hanya berkuat dengan ilmu agama dan memfokuskan diri untuk mendakwahkan Islam di masyarakat. Kini ternyata bermain dengan politik terutama politik praktis. Dimaksud dengan ulama di sini adalah mereka yang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, khususnya Dewan Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo atau PCNU Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan faktor apa saja yang melatarbelakangi Dewan Syariah PCNU Kabupaten Ponorogo untuk mendukung dan memenangkannya di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015 silam. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Penulis menemukan, bahwa adanya peran yang dilakukan oleh Dewan Syariah PCNU Kabupaten Ponorogo dalam kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Kabupaten Ponorogo. Dalam memenangkan Ipong Muchlissoni pada Pilkada Langsung 2015 silam, ulama yakni mereka yang tergabung dalam organisasi bernama Nahdlatul Ulama terutama Dewan Syariah PCNU Kabupaten Ponorogo. Memiliki peran yang sangat penting guna meyakinkan masyarakat terutama nahdliyin untuk memilih Ipong Muchlissoni sebagai Bupati mereka. Peran ulama yakni Dewan Syariah PCNU Kabupaten Ponorogo adalah: pengajian, menjadi tim sukses, dan mensosialisasikan calon ke masyarakat. Peran tersebut nyatanya mampu memenangkannya di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015. Teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah teori perilaku pemilih dan pilihan rasional. Dalam tulisan ini terlihat bahwa anggota Dewan Syariah PCNU Kabupaten Ponorogo berhasil mempengaruhi dan meyakinkan para pemilih di Kabupaten Ponorogo yang sebagaian besar adalah seorang nahdliyin untuk memilih Ipong Muchlissoni sebagai Bupati mereka selanjutnya.[16]

Berdasarkan hasil studi penelitian tersebut jika dikaitkan dengan fokus penelitian maka dapat disimpulkan bahwa para pemuka agama merupakan agen politik yang cukup professional, sangat menjanjikan atau terpercaya, serta sangat menguntungkan secara politis. Hal ini dikarenakan para pemuka agama ketika di ruang public berpenampilan sederhana, sedangkan jika dilihat ke belakang para pemuka agama tersebut membawa banyak massa (jamaah), bahkan bisa dihitung hanya dengan perkiraan semata. Perkiraan rata-rata untuk tiap orang pemuka agama minimal diikuti oleh 10-15 orang jamaah, yang bisa diperintah kapan dan dimana saja, dan tentunya bersedia memberikan suara serta dukungannya, bahkan bersedia untuk mencarikan dana atau biaya untuk kampanye serta mencari pemilih pendukung atau tim sukses untuk calon atau kandidat pemilihan umum (pemilu) tertentu.

4.2.4. Keterkaitan Antara Penanganan Radikalisme dengan Konsep Islam Moderat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

Maka dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian tentang keterkaitan antara program pemerintah dalam hal penanganan radikalisme dengan konsep atau asas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dalam hal ini memunculkan respon jawaban yang bervariasi atau bermacam-macam. Menurut pandangan saudara Muhammad Abdul Azis, dalam hal

konteks program penanganan radikalisme tidak sesuai atau saling bertentangan dengan konsep islam moderat organisasi NU, dan saudara Azis pun secara pribadi mengakui bahwa konteks perilaku tersebut memang mempunyai kemiripan atau condong pada perilaku pencitraan. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh saudara Johan Arfianto, bahwa dalam konteks tersebut secara sekilas memang terkesan kontradiktif namun pada hakikatnya tidak bertolak belakang. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh organisasi NU menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Maka dalam hal ini pun selaras dengan penjelasan saudara Sifa, karena ketika menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, dimana tidak ada pilihan alternatif yang lain, maka sudah sewajarnya organisasi NU bertindak atau berperilaku "tidak moderat" atau lepas dari asas atau konsep islam moderat. Menurutnya walaupun organisasi NU melakukan tindakan atau perilaku tersebut, hal itu sifatnya adalah "respon" atau "reaktif". Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Arif, bahwa perilaku yang dilakukan oleh organisasi NU dalam konteks penanganan radikalisme bersama pemerintah sama sekali tidak bertolak belakang dengan konsep islam moderat. Hal ini dikarenakan perilaku tersebut sesuai dengan dasar keyakinan beragama dan dasar bernegara. Saudara Arif memandang bahwa gerakan radikalisme sudah melewati batas aturan bernegara, dikarenakan gerakan radikalisme bertindak semaunya sendiri dengan berkeinginan untuk mengganti dasar negara (dalam hal ini pancasila dan UUD 1945) yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa (founding fathers), dan menurutnya hal tersebut sama saja dengan "melecehkan" para kiai NU yang ikut terlibat dalam perumusan serta ikut menyepakati dasar negara Indonesia. Pandangan lain yang bersifat "netral" dalam hal ini diungkapkan oleh saudara Tohari, bahwa semuanya kembali pada pertimbangan masing-masing individu. Menurutnya setiap perilaku harus dipertimbangkan sesuai dengan fakta atau situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, apakah harus bersikap toleran, diam, atau harus tegas dan melakukan perlawanan. Semua memiliki "batas" sesuai konteksnya, bahkan sikap toleran pun juga ada batasnya pula. Selanjutnya pandangan daripada saudara Ulum, yang secara pribadi kurang mengetahui terkait konteks tersebut. Menurutnya apabila ada suatu "pembenaran" dari para kiai NU, maka kita harus melaksanakannya dengan baik, tanpa mempertanyakan apa sebab dan tujuan daripada suatu tindakan atau perilaku tersebut. Studi penelitian berjudul "*Respon Islam Moderat Terhadap Ruang Konstitusional Religious Nation State Indonesia*", menjelaskan bahwa masalah relasi agama dan negara menuai perdebatan panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan perumusan konstitusionalisme negara. Oleh karena itu, perumusan dan pengesahan konstitusi menghasilkan ruang perdebatan berbagai macam aspirasi, tak terkecuali dengan melibatkan unsur keagamaan, yang berakhir dengan hubungan agama dan negara secara simbiotik (Religious Nation State). Respon umat Islam dengan adanya hubungan tersebut terbagi menjadi dua golongan, yaitu kelompok Islam radikal (kelompok yang meyakini bahwa empat pilar kebangsaan Indonesia adalah thoghut dan harus dimusnahkan), dan kelompok Islam moderat (kelompok yang menyetujui adanya Religious Nation State). Dukungan kelompok Islam moderat terhadap hubungan agama dan negara memiliki beberapa alasan mendasar, yaitu bahwa situasi dan kondisi multikulturalisme di Indonesia tidak dapat dikelola dengan sistem negara teokrasi. Selain itu, konsep bersyariah dalam konteks sistem kenegaraan diwujudkan dalam bentuk perjuangan untuk mencapai tujuan (esensi) syariah dengan tetap melalui asas serta prinsip dalam bingkai simbiotik (Religious Nation State). [17]

Berdasarkan hasil studi penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdapat suatu relasi atau hubungan yang bersifat "simbiotik" antara agama dan negara, yaitu antara ormas islam Nahdlatul Ulama (NU) dengan pihak Pemerintah. Maka tidak heran ketika muncul suatu kebijakan tertentu dan masih baru khususnya berkonteks kehidupan sosial keagamaan yang telah diputuskan dan disahkan oleh pemerintah, pasti dan akan selalu menggandeng NU (lewat PBNU).

4.3 Upaya Pembangunan Citra Ormas Islam Moderat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

4.3.1 Respon Para Kader Terkait Adanya Upaya Pembangunan Citra Ormas Islam Moderat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian terkait adanya upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa respon jawaban diantaranya ;

a. "Membenarkan" adanya upaya pembangunan citra ormas islam moderat

Hal ini berdasarkan penjelasan subjek penelitian yang mempunyai alasan bahwa perilaku pembangunan citra tersebut termasuk dalam strategi dakwah organisasi NU dan merupakan strategi dalam konteks penanganan gerakan radikalisme, serta adanya kekhawatiran berdirinya negara islam di Indonesia

b. "Bukan merupakan upaya pencitraan"

Hal ini berdasarkan penjelasan subjek penelitian yang beralasan bahwa perilaku tersebut hanya sekedar "kampanye" biasa, dan merupakan suatu bentuk sikap yang bijaksana sesuai situasi, kondisi, dan konteks di lapangan, serta bagian daripada dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, menurut subjek penelitian, perilaku tersebut merupakan bagian daripada strategi perang pemikiran (proxy war), khususnya dalam rangka mengkonter gerakan radikalisme di media sosial digital.

c. "Pandangan netral" atau diluar istilah "pencitraan"

Hal ini berdasarkan penjelasan subjek penelitian yang beralasan bahwa perilaku tersebut dalam rangka "pengamanan" atau "pertahanan" terhadap konten postingan yang dianggap "serangan" dan berpotensi besar membahayakan organisasi NU di ranah media sosial digital. Maka langkah-langkah yang diambil diantaranya yaitu ikut mewarnai, mendominasi, dan menguasai media sosial digital dengan konten postingan yang berbau ke-NUan, serta dalam rangka sebagai penyeimbang (balancing) di ranah media sosial digital.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat diperoleh beberapa poin garis besar, bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa para subjek penelitian memang mendukung (support) adanya perilaku atau kegiatan tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan adanya latarbelakang kegiatan yang dipelopori langsung (backup) berdasar nama atau label organisasi. Maka adanya kegiatan tersebut mempunyai landasan kewenangan dan otoritas secara legal-formal (asas legalitas) dari organisasi terkait yaitu ormas islam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri. Kemudian proses sosialisasi yang dilakukan secara internal dan eksternal (ke dalam dan ke luar) tubuh organisasi berkembang secara konstruktif yang akhirnya memperoleh legitimasi kuat khususnya bagi para kader ormas islam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri. Namun daripada itu seluruh kegiatan yang dilakukan bersifat responsive, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan akibat dari suatu faktor atau sebab tertentu yang melatarbelakangi (menyebabkan-mengakibatkan) dilakukannya kegiatan tersebut.

4.3.2 Motif Upaya Pembangunan Citra Ormas Islam Moderat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) DI Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

a. Motif Sebab (Because Motive)

Berkaitan dengan tema atau topik penelitian tentang upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang dalam hal ini menurut teori Schutz tentang Motif Sebab (Because Motive), maka motif sebab tersebut merupakan bagian daripada makna suatu pengalaman yang murni dialami oleh individu atau para subjek penelitian yaitu para kader organisasi NU baik struktural maupun non struktural (kultural). Maka secara detail, makna pengalaman tersebut tidak hanya terkait dengan alasan dilakukannya suatu tindakan atau perilaku oleh aktor pelaku, namun terkait dengan apa dan mengapa tindakan tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh aktor pelaku. Oleh karena itu, berdasarkan hasil studi wawancara dengan para subjek penelitian yaitu para kader organisasi NU struktural dan kultural terkait Motif Sebab (Because Motive)

dilakukannya upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), diantaranya sebagai berikut ;

1. Bentuk Atau Wujud "Penghormatan, Ketaatan, Dan Kepercayaan Total" Sebagai Seorang Santri Kepada Para Kiai Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut subjek penelitian dalam hal ini para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU), upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disebabkan karena adanya suatu pemahaman bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk atau wujud etika atau sikap daripada kader organisasi NU sebagai seorang santri yang sangat menghormati, taat dan patuh terhadap para kiai NU. Oleh karena itu, bentuk atau wujud etika tersebut tidak hanya sebatas taat dan patuh saja, namun sebagai seorang santri juga harus pasrah dan percaya penuh pada apapun yang diucapkan dan diperintahkan oleh para kiai NU. Maka dengan adanya pemahaman tersebut "haram" hukumnya seseorang yang berposisi sebagai santri untuk mempertanyakan apa maksud dan tujuan perihal keputusan yang diperintahkan atau diamanatkan oleh para kiai NU kepada seluruh santrinya. Berdasarkan motif sebab tersebut maka ditemukan fakta bahwa terdapat pembenaran bahkan instruksi dari para kiai NU terkait upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU, serta dalam hal ini para kader organisasi NU yang berposisi sebagai santri dari para kiai NU senantiasa melaksanakan instruksi tersebut dan bertindak sebagai pelaksana atau "eksekutor" saja. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor atau motif sebab para kader organisasi NU dalam melakukan upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

2. Adanya "Penurunan Kualitas" Para Kader Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut subjek penelitian dalam hal ini para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU), upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disebabkan karena adanya penurunan kualitas para kader organisasi NU. Hal ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa semakin lama para kader organisasi NU semakin lembek atau kurang tegas dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab organisasi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor usia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa memang usia sebagian besar para kader organisasi NU sudah tergolong usia lanjut atau sudah tidak produktif (kisaran 40-60 tahun bahkan lebih). Hal inilah yang merupakan salah satu faktor atau motif sebab para kader organisasi NU dalam melakukan upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

3. Adanya Potensi Serta Dampak Negatif Dari Gerakan Radikalisme Di Indonesia

Menurut subjek penelitian dalam hal ini para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU), upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disebabkan karena adanya beberapa potensi serta dampak negatif dari gerakan radikalisme di Indonesia, khususnya bagi organisasi NU, NKRI, dan terkait dunia media sosial digital. Bagi organisasi NU, gerakan radikalisme yang dipelopori oleh ormas-ormas islam selain NU (khususnya yang termasuk ormas islam radikal) faktanya banyak berpotensi menimbulkan pengaruh buruk bagi umat islam. Pada level akar rumput (grassroot) ormas islam radikal tersebut ketika di depan publik mengaku memiliki kesamaan dengan organisasi NU dengan tujuan untuk menarik simpati warga NU kultural yang masih "awam", namun di belakang itu mereka secara nyata mempunyai "agenda khusus" yang bertujuan untuk melemahkan dan mempersempit ruang gerak organisasi NU khususnya di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Bagi Pemerintah dan NKRI, ormas islam radikal tersebut mempunyai agenda khusus lain, yaitu mengganti sistem demokrasi pancasila dan NKRI menjadi sistem khilafah (versi mereka) dan negara islam. Maka dalam hal ini mereka secara jelas sudah melewati batas aturan hukum dan undang-undang negara Indonesia. Selain itu di ranah media sosial digital, mereka membuat opini negatif dan berita hoax yang bertujuan

untuk menyudutkan, menyerang, serta mencemarkan nama baik organisasi NU dan Pemerintah dengan menggunakan banyak akun palsu (anonim/fake).

b. Motif Tujuan (In Order To Motive)

Berkaitan dengan tema atau topik penelitian tentang upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang dalam hal ini menurut teori Schutz tentang Motif Tujuan (In Order To Motive), maka motif tujuan tersebut merupakan bagian daripada kesadaran suatu pengalaman yang murni dialami oleh individu atau para subjek penelitian yaitu para kader organisasi NU baik struktural maupun non struktural (kultural). Maka secara detail, kesadaran pengalaman tersebut adalah terkait dengan untuk apa atau apa tujuan dilakukannya suatu tindakan atau perilaku oleh aktor pelaku. Oleh karena itu, berdasarkan hasil studi wawancara dengan para subjek penelitian yaitu para kader organisasi NU struktural dan kultural terkait Motif Tujuan (In Order To Motive) dilakukannya upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), diantaranya sebagai berikut ;

1. Benteng Pertahanan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Menurut subjek penelitian dalam hal ini para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU), upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto bertujuan ; Pertama, sebagai bentuk pengabdian sebagai kader organisasi NU yang harus dan wajib menjaga organisasi NU, agar organisasi NU tetap kokoh, bertahan, dan berdiri tegak sampai kapanpun. Kedua, sebagai komitmen sebagai warga negara Indonesia yang berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah negara Indonesia, agar tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram. Ketiga, sebagai benteng atau "tonggak" pertahanan organisasi NU dan NKRI. Hal ini dikarenakan menurut para kader organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto jika organisasi NU bubar, maka negara Indonesia juga pasti bubar. Keempat, sebagai bentuk "serangan balik" untuk mewarnai, mengkonter, menyeimbangkan, menyaingi, mendominasi, hingga menguasai dunia media sosial digital dengan konten postingan yang menguatkan organisasi NU dan pemerintah negara Indonesia. Kelima, sebagai tanda identitas serta pembanding untuk membedakan antara ormas islam NU dengan ormas islam lain, bahkan dengan ormas islam yang termasuk "ormas islam radikal".

2. Penggugah Semangat Para Kader Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Secara Struktural Dan Kultural

Menurut subjek penelitian dalam hal ini para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU), upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk menggugah semangat berorganisasi para kader organisasi NU, baik struktural maupun kultural. Hal ini dikarenakan sebagian besar daripada para kader organisasi NU sudah berusia tidak produktif atau berusia lanjut. Maka dalam hal ini dinilai perlu adanya suatu dorongan motivasi untuk menggerakkan kembali semangat para kader agar lebih giat berorganisasi. Oleh karena itu upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU hanya digunakan sebagai "penggugah semangat" oleh para pimpinan organisasi kepada "anak buah" atau para kader organisasi NU, khususnya di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

3. Pengabdian "Santri" Kepada "Para Kiai"

Menurut subjek penelitian dalam hal ini para kader organisasi Nahdlatul Ulama (NU), upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk menunjukkan sikap pengabdian dan etika para kader organisasi NU yang memosisikan diri sebagai seorang santri kepada para kiai NU. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi kehidupan ala pesantren masih sangat kental khususnya di kalangan NU. Tidak memungkiri bahwa

walaupun di level atau tingkat organisasi yang menggunakan model tata kelola keorganisasian modern, namun masih tetap diwarnai dengan corak tradisi lokal ala pondok pesantren.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan data di lokasi penelitian yang dalam hal ini di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka terdapat beberapa poin pokok yang merupakan garis besar daripada keseluruhan hasil penelitian, yang diantaranya tentang strategi dan penerapan moderasi beragama organisasi Nahdlatul Ulama (NU), lalu pandangan MWC NU terhadap eksistensi ormas islam lain, serta motif upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Pertama, terkait masalah strategi dan penerapan moderasi beragama organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, bahwa penerapan moderasi beragama yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah mengakar di dalam organisasi NU. Salah satu bukti adanya penerapan perilaku moderasi beragama yaitu kegiatan pengamanan (PAM) di salah satu gereja (yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Trawas) pada saat momen hari Natal yaitu pada tanggal 25 Desember tiap tahun. Latarbelakang adanya upaya penerapan moderasi beragama tersebut adalah dikarenakan persamaan sebagai sesama manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, persamaan nasib sebagai sesama warga negara Indonesia, serta karena komitmen sebagai warga negara yang senantiasa berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI. Strategi penerapan moderasi beragama yang dilakukan oleh organisasi NU di wilayah Kecamatan Trawas, dilakukan dengan cara senantiasa menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan baik di seluruh lapisan masyarakat. Lalu terkait pemahaman tentang konsep islam moderat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), bahwa konsep islam moderat dalam bentuk pandangan atau pemikiran adalah konsep beragama islam yang berada di tengah (tidak ekstrim kanan maupun kiri), serta tidak boleh ada ekstrimitas atau diskriminasi terhadap sesama manusia, apapun latarbelakangnya. Serta dalam bentuk sikap yaitu dengan bersikap luwes atau fleksibel dan tidak bersikap kaku dan agresif dalam hal beragama, serta harus menjaga kebangsaan, menerima segala perbedaan dan keberagaman, juga tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat, kearifan dan kebudayaan lokal. Selanjutnya terkait sikap dan pandangan terhadap umat agama lain, yaitu bahwa dari sisi pandangan pribadi tidak boleh memaksa umat agam lain dalam masalah keyakinan beragama. Kemudian secara sikap harus saling menghormati, saling membantu dalam hubungan sosial dengan dasar hubungan sesama manusia (ukhuwah basyariyah) dan hubungan sesama warga negara (ukhuwah wathaniyah).

Kedua, terkait pandangan MWC NU terhadap eksistensi ormas islam lain, bahwa hubungan antara MWC NU dengan sesama ormas islam di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto cukup baik dan bukan merupakan ancaman yang berarti. Kendala permasalahan yang sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam pilihan dalil pedoman keagamaan, perbedaan pilihan cara atau metode dakwah, dan perbedaan label organisasi. Maka dari itu, sikap yang dinilai cukup bijaksana terkait permasalahan tersebut adalah dengan tetap bersikap moderat, serta tidak ada alasan bagi warga NU untuk mencampuri, mengusik, dan mengintervensi wilayah internal organisasi ormas islam lain, selama kegiatan yang dilakukan oleh ormas- ormas islam di luar NU tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, lalu tidak membuat kegaduhan atau saling menjaga keamanan dan ketertiban, serta berdampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu beberapa subjek ada yang berpendapat bahwa aktifitas ormas islam di luar NU atau selain NU berdampak buruk atau negatif, khususnya bagi organisasi NU sendiri, dan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya terkait respon terhadap program deradikalisasi oleh pemerintah, maka secara keseluruhan para subjek menyatakan sikap dukungannya dengan beberapa alasan, diantaranya ; a) Karena pemerintah menggandeng pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu mitranya, b) Karena sebagai warga negara yang senantiasa taat kepada aturan pemerintah, serta sebagai santri yang wajib mengikuti para kiai, c) Karena sinergi antar kelompok sangat penting sebagai tonggak utama lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, d) Karena banyak warga

NU di lapisan kultural yang digerosoti secara perlahan oleh ormas-ormas islam lain, terutama ormas islam yang radikal atau terlarang, e) Karena dalam hal ini berhadapan dengan ormas islam terlarang, melalui proxy war atau perang pemikiran berupa opini, sudut pandang, serta serangan hoax.

Selanjutnya tentang hubungan antara penanganan radikalisme (deradikalisasi) dengan konsep islam moderat organisasi NU, dalam hal ini memunculkan beberapa respon dan pandangan dari para subjek atau para kader organisasi NU, bahwa ada yang berpendapat bahwa kedua hal tersebut memang sangat bertolak belakang, lalu ada juga yang berpendapat bahwa kedua hal tersebut sama sekali tidak bertolak belakang satu sama lain, serta berpendapat netral.

Ketiga, tentang upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU menurut pandangan para subjek diantaranya ada yang membenarkan, ada juga yang menolak atau tidak mengakui adanya upaya pembangunan citra tersebut, dan ada juga yang menyatakan bersikap netral. Selanjutnya terkait motif sebab (Because Motive) upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU yaitu ; a) Bentuk atau wujud penghormatan, ketaatan, dan kepercayaan total sebagai seorang santri kepada para kiai NU, b) Adanya penurunan kualitas para kader organisasi NU, c) Adanya potensi atau dampak negatif dari gerakan radikalisme di Indonesia. Lalu terkait motif tujuan (In Order To Motive) upaya pembangunan citra ormas islam moderat organisasi NU yaitu ; a) Benteng pertahanan organisasi NU dan NKRI, b) Penggugah semangat para kader struktural dan kultural organisasi NU, c) Pengabdian santri kepada para kiai NU.

Daftar Pustaka

- [1] Huda, M. (2016). ISLAM DAN CIVIL SOCIETY (DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN). *Fikri*, 1(1), 1–22.
- [2] Ali, H., Purwandi, L., Nugroho, H., Halim, T., & Firdaus, K. (2019). *Indonesia Moslem Report 2019. December*, 11–14.
- [3] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2015). Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. *Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-33 NU*, 1–204.
- [4] Hannan, A. (2018). Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 152.
- [5] Abdurrohman, A. (2018). Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam. *Rausyan Fikir: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 29–41.
- [6] Andriasanti, L. (2016). Kontestasi Identitas Islam Moderat Di Asia Tenggara. *Jurnal International & Diplomacy*, 2(1), 1–8.
- [7] Umar, A. R. M. (2016). A Genealogy Of Moderate Islam : Governmentality And Discourses Of Islam In Indonesia's Foreign Policy. *Studia Islamika : Indonesian Journal For Islamic Studies*, 23(3).
- [8] Muzakki, J. F. (2020). *Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang Di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*.
- [9] Febrina, A. (2019). Motif Orangtua Mengunggah Foto Anak di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orangtua di Jabodetabek). *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55–65.
- [10] Iskandar, D., & Jacky, M. (2015). Studi fenomenologi motif anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 3(1), 1– 12.
- [11] Sadewo, F. S. (2016). *Meneliti Itu Mudah*. UNESA University Press.

- [12] Siswanto. (2019). The Islamic Moderation Values on the Islamic Education Curriculum in Indonesia: A Content Analysis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 121–152.
- [13] Mubarok, A. A., & Rustam, D. G. (2018). Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 153–168.
- [14] Muji Buddin SM, M. (2017). Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto.
- [15] Artiningsih, D. (2019). Analisis Wacana Kritis Terhadap Teks Berita Pembakaran Bendera Berlafal Tauhid Pada Media Online Suara-Islam.com. In UIN Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- [16] Diponegoro, A. M. (2016). Ulama Sebagai Kekuatan Politik : Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [17] Alimin. (2019). Respons Islam Moderat Terhadap Ruang Konstitusional Religious Nation State Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(2), 2019.